

Analisis Good Corporate Governance Pada Dinas Pertanahan Kota Makassar

Analysis of Good Corporate Governance at the Makassar City Land Service

Sitti Warda Ningsi, Haeruddin Saleh, Arifuddin Mane

Pogram Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

*Correspondent author email: sittiwardaningsi@gmail.com

Diterima: 10 September 2023 / Disetujui: 30 Desember 2023

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas good corporate governance pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dan untuk mengetahui penerapan transparansi good corporate governance pada Dinas Pertanahan Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data hingga pada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator akuntabilitas dan transparansi, dimana akuntabilitas yang diterapkan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar adalah dalam bentuk vertikal dan sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat pada pertanggungjawaban kerja pegawai dalam bentuk laporan dan dengan dilakukannya evaluasi ataupun audit oleh inspektorat sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Penerapan transparansi pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam hal pengelolaan keuangan belum terbuka kepada masyarakat umum, meskipun demikian transparansi informasi sudah dilakukan dengan sangat baik.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Dinas Pertanahan, Makassar*

Abstract: *The research aims to determine good corporate accountability governance at the Makassar City Land Service and to find out implementation transparency of good corporate governance at the Makassar City Land Service. The type of research used is descriptive qualitative method data collection in the form of interviews, direct observation and documentation. As for The data analysis method used is data reduction, data presentation up to drawing conclusions and verification. The results of this research show that the implementation of good corporate governance towards financial management at the City Land Service Makassar is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management with accountability indicators and transparency, where accountability is applied to the City Land Service Makassar is in a vertical form and is running well, this can be seen on employee work accountability in the form of reports and by carrying out them evaluation or audit by the inspectorate as proof of management accountability finance. Implementation of transparency in the Makassar City Land Service in terms of Financial management is not yet open to the general public, however Information transparency has been carried out very well.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Land Service, Makassar*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Manajemen selalu dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan individu dalam berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan hidup manusia hingga saat ini. Manajemen memberikan definisi yang jelas tentang tujuan, pembagian tugas, pertanggungjawaban, dan pedoman umum untuk berpikir, sikap dan model peran untuk memastikan bahwa peran dan tanggung jawab ini dilakukan secara teratur tanpa membebani satu sama lain demi tujuan yang telah terencana sebelumnya. Firmansyah (2018) mengatakan manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Pengelolaan keuangan merupakan bidang yang sangat penting karena mempengaruhi semua kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan dan instansi pemerintah. Secara harafiah Armero dkk (2020) mengatakan manajemen keuangan berasal dari kata management yang berarti pengelolaan serta keuangan yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan uang, seperti biaya, investasi dan

modal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan metode pengelolaan keuangan, mulai dari memperoleh sumber dana, mengalokasikan dana untuk sarana investasi untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi, dan melakukan yang terbaik dalam menggunakan dana.

Masyarakat sekarang ini mendesak akan pelayanan publik yang disediakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan haruslah transparan dan akuntabel. Hal ini untuk mencegah tindakan penyalahgunaan keuangan, pemborosan dan efisiensi dalam penggunaan dana yang dapat menciptakan celah bagi tindak pidana korupsi tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang sehat dibutuhkan hukum dan sistem yang kuat yang berdasar dan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Tata kelola yang baik atau biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antar para pemangku kepentingan. Perusahaan maupun instansi pemerintah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. *Good Corporate Governance* (GCG) secara umum adalah merupakan sistem pengendalian dan pengaturan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition).

Sutedi (2011) mengatakan *corporate governance* membantu badan usaha (pemegang saham/kapitalis, anggota/broker dan pengurus) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan tanggung jawab perusahaan untuk mencapai nilai pemegang 3 saham jangka panjang, dengan memperhatikan kepentingan pemangku jabatan lainnya yang didasarkan pada nilai-nilai hukum dan etika. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadikan manajemen perusahaan lebih fokus dan jelas dalam pemberian tugas, tanggung jawab dan pengendalian. Terdapat 5 prinsip fundamental yang dibutuhkan di dalam penerapan konsepsi *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, indenpendensi dan kewajaran atau kesetaraan (Manossoh, 2016). Kelima prinsip tersebut berpengaruh karena dapat menambah nilai pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan maupun institusi secara menyeluruh. Konsep tata kelola perusahaan yang baik diusulkan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang lebih transparan terhadap semua pemakai laporan keuangan. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan salah satunya dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan tetap berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan yang sehat. Salah satu prinsip pengelolaan keuangan adalah transparan. Mane (2020) mengatakan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Adapun yang terjadi pada Dinas Pertanahan Kota Makassar yaitu tidak serta merta terbuka kepada masyarakat umum terkait dalam hal pengelolaan keuangan tentunya hal ini dikarenakan oleh adanya prosedur dan kurangnya akses media sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui pengelolaan keuangan dan akhirnya akan menimbulkan rasa kurang percaya masyarakat kepada pemerintah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dewasa ini berada pada fase adanya tuntutan untuk menyampaikan kepada publik apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin telah diselenggarakannya tata kelola organisasi atau perusahaan tersebut dengan baik. Namun tampaknya *Good Corporate Governance* masih dirasakan seperti sebuah slogan, harapan, atau cita-cita yang ideal. Hal ini dikarenakan pedoman *Good Corporate Governance* hanya dalam bentuk rekomendasi dan belum sepenuhnya ketentuan *Good Corporate Governance* diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga banyak perusahaan atau organisasi merasa enggan untuk menerapkannya secara penuh.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas good corporate governance pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dan untuk mengetahui penerapan transparansi *good corporate governance* pada Dinas Pertanahan Kota Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Dinas Pertanahan Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Jenderal Achmad Yani No.2, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, penelitian kualitatif deskriptif secara teknis merupakan metode penelitian yang menggunakan data kualitatif untuk mendeskripsikannya. Bogdan dan Taylor berpendapat dalam Moleong (2010) bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dan perilaku orang yang dapat diamati. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan pengalaman informan dan didukung oleh data kualitatif, di mana peneliti mengungkapkan fakta-fakta tertentu dan kemudian menyajikan gambaran objektif dari masalah yang dihadapinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai *good corporate governance* pada Dinas Pertanahan Kota Makassar yang didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pada pasal 4 bagian ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.” Dimana hal ini sejalan dengan prinsip utama Good Corporate Governance yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran. Pengelolaan manajemen keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dapat diketahui menggunakan indikator berikut ini.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur negara ataupun pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang diterapkannya. Berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, aparatur negara harus menerapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing secara jelas dan selaras dengan visi, misi, dan tujuan instansi. Berdasarkan pada indikator tersebut, terdapat beberapa pertanyaan wawancara yang diajukan peneliti kepada para narasumber yang terdiri dari Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Pengadaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah, dan Kepala Bidang Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan Tanah dengan deskripsi data sebagai berikut.

Akuntabilitas pengelolaan manajemen keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar yaitu bahwa akuntabilitas keuangannya dilakukan secara vertikal. Dimana dalam hal ini dilakukan pelaporan keuangan langsung kepada Walikota Makassar. Terkait dengan laporan keuangan pada masing-masing bidang, akuntabilitasnya yaitu dalam bentuk laporan keuangan terhadap segala kegiatan yang dilaporkan pada bidang keuangan yang selanjutnya akan dievaluasi. Pertanggungjawaban tugas yang dilakukakan oleh pegawai dalam melakukan pengelolaan manajemen keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar adalah dengan membuat laporan kerja terhadap semua kegiatan baik itu pembelanjaan, pelatihan pegawai, kegiatan lapangan dan sebagainya beserta dengan anggaran yang digunakan. Adapun bentuk kewajiban dari mengelola manajemen keuangan adalah setiap pegawai dan staf berkewajiban untuk mempergunakan anggaran yang ada sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati dan disetujui serta meminimalisir pengeluaran.

Terkait dengan kemampuan pegawai Dinas Pertanahan dalam hal mengelola keuangan dapat dikatakan bahwa kemampuan pegawai dalam mengelola keuangan sudah sangat baik dan dapat dikatakan kompeten, hal ini dapat dilihat dari kinerja mereka dan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan keuangan yang diadakan oleh kementerian. Adapun mengenai pentingnya penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dapat dikatakan bahwa penerapan akuntabilitas sangat penting karena berhubungan dengan tanggung jawab kerja yang

dilaksanakan. Dengan adanya akuntabilitas penyimpangan-penyimpangan dalam hal mengelola keuangan dapat diminimalisir selain itu juga untuk meningkatkan sikap jujur dalam diri pegawai.

Transparansi

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan atau terbuka terhadap rakyatnya, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, dan pengelolaan keuangan, tetapi tidak serta merta prinsip ini hanya berfokus pada keuangan saja namun juga pada hal lainnya yang menyangkut keberlangsungan hidup perusahaan ataupun instansi. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain dapat mengetahui keadaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Untuk menjaga obyektivitas, maka haruslah tersedia informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang lain. Berdasarkan pada indikator tersebut, terdapat beberapa pertanyaan wawancara yang diajukan peneliti kepada para narasumber yang terdiri dari Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kabid Pengadaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah, dan Kabid Penanganan Masalah Tanah dengan deskripsi data sebagai berikut.

Transparansi pengelolaan manajemen keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dapat dikatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan setiap pembelanjaan ataupun kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, dapat dilihat pada evaluasi yang dilakukan setiap 3 bulan dan setiap akhir tahun dimana evaluasi ini dilakukan oleh inspektorat selaku pengawas. Penerapan transparansi instansi dalam memberikan akses informasi yang luas secara mudah kepada masyarakat dapat dikatakan bahwa penyebaran informasinya sangat bagus. Segala hal tentang pembaruan informasi pelayanan publik, kegiatan program kerja dan lain sebagainya dapat dilihat pada akun media sosial Dinas Pertanahan khususnya facebook, selain itu Dinas Pertanahan juga mempunyai website yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Adapun mengenai seberapa penting transparansi terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dapat dikatakan sangat penting hal ini karena menyangkut pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait pengelolaan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat, dimana anggaran ini harus dipergunakan sebaik mungkin sesuai kebutuhan sebagaimana mestinya.

Mengenai tentang faktor penghambat dalam penerapan transparansi terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dapat dikatakan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan untuk terbuka dalam melakukan pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan semua bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka tanpa ada yang ditutupi sehingga saat dilakukan audit semuanya dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan.

Pembahasan

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaksanaannya pun telah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini.

- 1) Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya terhadap lima narasumber berbeda pada Dinas Pertanahan Kota Makassar tentang akuntabilitas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dilakukan secara vertikal dimana dalam hal ini dilakukan pertanggungjawaban langsung kepada Walikota Makassar, untuk laporan penggunaan keuangan pada masing-masing bidang, akuntabilitasnya diserahkan pada bagian keuangan untuk selanjutnya dievaluasi. Mengenai bentuk tanggung jawab kerja yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam melakukan pengelolaan manajemen keuangan maka bentuk tanggung jawab kerjanya adalah dengan membuat laporan terhadap semua kegiatan baik itu pembelanjaan, pelatihan pegawai, kegiatan lapangan dan lain sebagainya beserta dengan anggaran yang

digunakan. Adapun untuk bentuk dari kewajiban yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan adalah setiap pegawai dan staf berkewajiban untuk mempergunakan anggaran yang telah dicairkan sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati dan disetujui sebelumnya serta meminimalisir pengeluaran. Sedangkan untuk kemampuan pegawai Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam melakukan pengelolaan keuangan sudah sangat baik dan kompeten, hal ini dapat dilihat dari kinerja mereka dan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan keuangan yang diadakan oleh kementerian. Untuk seberapa penting penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar maka penerapan akuntabilitas sangat penting untuk dilakukan karena berhubungan dengan tanggung jawab kerja yang dilaksanakan, sehingga dengan adanya akuntabilitas penyimpangan-penyimpangan dalam mengelola keuangan dapat diminimalisir selain itu juga dapat meningkatkan sikap jujur dan tanggung jawab pegawai dalam bekerja.

- 2) Jadi, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terkait tentang transparansi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penerapan transparansi pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dapat dilihat pada laporan keuangan dan evaluasi terhadap semua penggunaan anggaran baik itu untuk rencana pembelanjaan, kegiatan lapangan, maupun program lain yang sebelumnya telah dilakukan rapat rencana kerja untuk satu tahun ke depan yang tertuang dalam bentuk laporan tertulis, dokumentasi, ataupun laporan langsung kepada atasan yang semuanya tidak ada yang ditutupi. Adapun evaluasi keseluruhan dilakukan baik dalam kurun waktu per tiga bulan ataupun tiap akhir tahun baik dilakukan oleh inspektorat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ataupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terkait dengan transparansi yang dilakukan Dinas Pertanahan dalam hal memberikan akses informasi yang luas secara mudah kepada masyarakat dapat dilihat pada website yang tetap mengacu pada website pemerintah kota yang didalamnya terdapat sub-sub domain dari masing-masing instansi maupun akun media sosial Dinas Pertanahan terutama facebook yang didalamnya memuat berbagai hal tentang Dinas Pertanahan, baik itu kegiatan lapangan ataupun pembaruan informasi pelayanan masyarakat, tetapi untuk transparansi keuangan secara keseluruhan tidak dapat diakses oleh masyarakat karena adanya beberapa peraturan yang mengikat. Untuk pentingnya penerapan transparansi terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar dinilai sangat penting karena hal ini menyangkut tanggung jawab sebagai aparatur negara menyangkut kepercayaan masyarakat, karena dimana anggaran yang diperoleh untuk semua kegiatan berasal dari pajak masyarakat tentunya selain itu juga untuk menghindari dan mencegah adanya tindakan-tindakan menyimpang seperti korupsi. Serta untuk hambatan dalam hal penerapan transparansi dinilai tidak ada hambatan karena tidak ada yang perlu ditutupi. Semuanya tertera secara jelas dalam laporan keuangan yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi.
- 3) Melihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dapat dikatakan bahwa dalam penerapan Good Corporate Governance pada Dinas Pertanahan Kota Makassar, akuntabilitas dan transparansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan yang baik, dimana keduanya merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan. Akuntabilitas dan transparansi harus berjalan beriringan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan keuangan dan kinerja keuangan dapat berjalan dengan baik..

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas good corporate governance pada Dinas Pertanahan Kota Makassar sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat pada pertanggung jawaban kerja yang langsung dilaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Walikota Makassar, adanya laporan pertanggung jawaban dari penggunaan setiap anggaran yang dikeluarkan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kerja pegawai. Selain itu dengan dilakukannya evaluasi ataupun audit oleh inspektorat menjadi salah satu bukti bahwa penerapan akuntabilitas pada pengelolaan manajemen keuangan dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Penerapan transparansi good corporate governance pada Dinas Pertanahan Kota Makassar belum terbuka kepada masyarakat umum terkait

dengan pengelolaan keuangan, hal ini dikarenakan adanya aturan yang mengikat. Tetapi meskipun demikian, transparansi informasi sudah dilakukan dengan sangat baik, hal ini terbukti dengan mudahnya masyarakat dapat mengakses informasi-informasi terbaru pada website dan akun sosial media Dinas Pertanahan Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Intan Nur. 2021. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Ekonomi Bosowa*, Vol.6, No.003:165-172.
- Alwi Nirwana. 2021. Analisis Tata Kelola Keuangan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo” Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Anggito, Albi dan Setiawan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Astawinetu Dyah, Erwin dan Handini Sri. 2020. *Manajemen Keuangan: Teori dan Praktek*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Erowati, Dewi. 2020. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Pasuruan: Qiara Media.
- Fadhallah, R.A. 2020. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Hartono, Jogiyatno, dkk. 2018. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi.
- Krisnadi, Herry, Suryono Efendi dan Edi Sugiono. 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta Selatan: LPU UNAS.
- Kusmayadi, Dedi, Dedi Rudiana dan Jajang Badruzaman. 2015. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Latif, Arsan, dkk. 2019. *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Asian Development Bank.
- Manossoh, Hendrik. 2016. *Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: Norlive Kharisma Indonesia.
- Mulyawan, Setia. 2015. *Manajemen Keuangan*. Solo: Pustaka Setia.
- Musthafa. 2017. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi.
- Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media.
- Siyoto, Sandu dan Sodik Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudarmanto, Eko, dkk. 2021. *Good Corporate Governance*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Suleman, Dede, Rahmawaty Marginingsih dan Isnurrini Hidayat. 2019. *Manajemen Keuangan*. Jakarta.
- Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2018. *Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Yuesti, Anik dan Putu Kepramaremi. 2019. *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis*. Bali: Noah Alethia.